



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# HASIL ANNUAL MEETING IMF-WBG 2018

# BALI INITIATIVE

1. Penanganan Ketidakstabilan Ekonomi Global
2. Penanganan Urbanisasi
3. Investasi pada Human Capital
4. Prakarsa Bali Fintech Agenda
5. Strategi Penanganan Bencana
6. Penanganan Perubahan Iklim
7. Prakarsa Pembiayaan Infrastruktur
8. Kesepakatan Capital Package



# Penanganan Ketidakstabilan Ekonomi Global: Rilis WEO October 2018

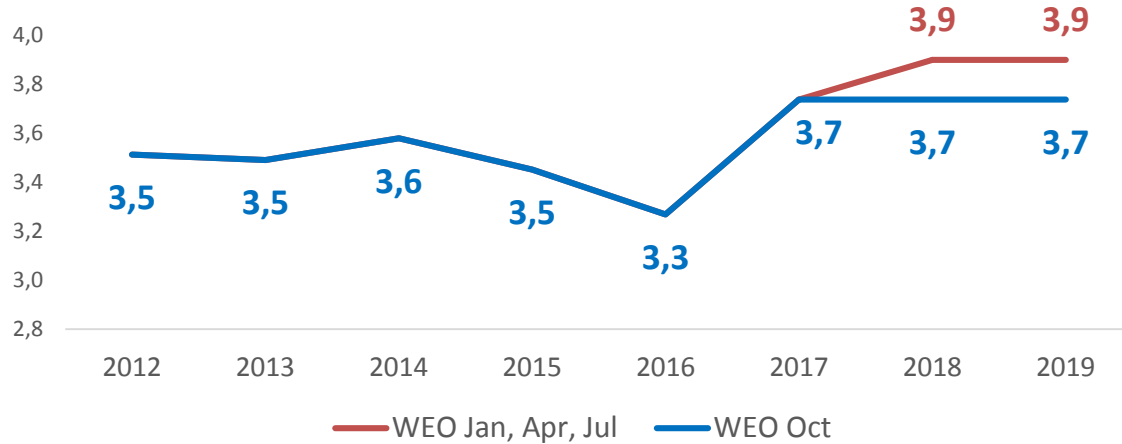
- IMF merilis *World Economic Outlook (WEO) October 2018*. IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2018 dan 2019 sebanyak 0.2 *percentage points* menjadi 3.7%, atau pada tingkat yang sama dengan realisasi tahun 2017. Meskipun demikian tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibanding periode 2012-2016.
- Proyeksi untuk kelompok negara maju dan negara berkembang sama-sama mengalami penurunan menunjukkan risiko global yang telah diantisipasi sebelumnya semakin meningkat:
  - ✓ Ketidakpastian perdagangan internasional yang semakin meningkat
  - ✓ Pengetatan likuiditas akibat normalisasi kebijakan moneter AS
- Dengan meningkatnya tensi perdagangan, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global 2018 dan 2019 turun tajam masing-masing 0.9 dan 0.7 *percentage points* dibanding proyeksi WEO April menjadi 4.2% dan 4.0%. Angka tersebut menunjukkan perlambatan pertumbuhan volume perdagangan yang cukup dalam dibanding realisasi tahun 2017 sebesar 5.2%.
- Dengan prospek global yang menurun, terdapat dampak pada kelompok negara berkembang di mana proyeksi pertumbuhannya direvisi ke bawah sebesar 0.2 dan 0.4 *percentage points* menjadi masing-masing 4.7% di tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian pertumbuhan kelompok ini diperkirakan akan relatif stagnan sejak 2017.
- Kelompok negara maju bahkan diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2.4% di tahun 2018 menjadi 2.1% di 2019 dibayangi oleh penurunan produktivitas dan berkurangnya stimulus fiskal AS.



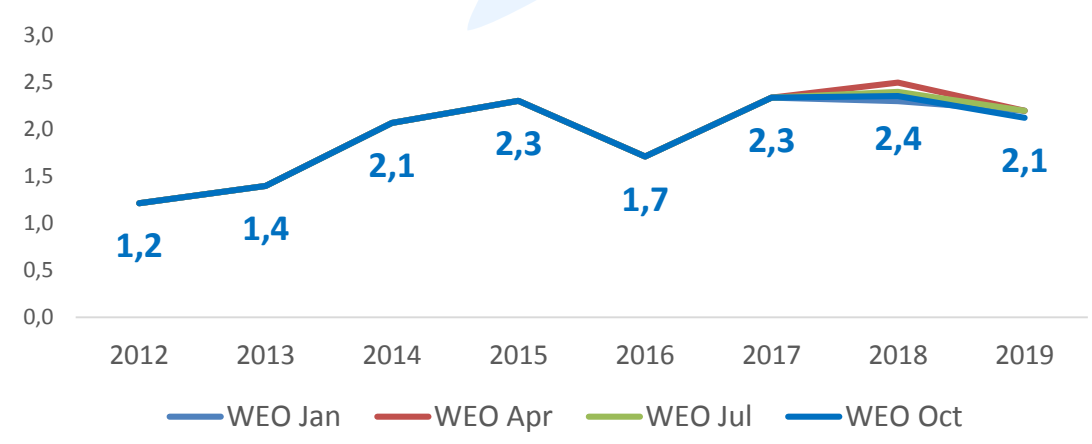
# Risiko global meningkat seiring tensi perdagangan yang semakin intensif dan likuiditas yang menegat

**Dalam World Economic Outlook Oktober 2018, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2018-2019**

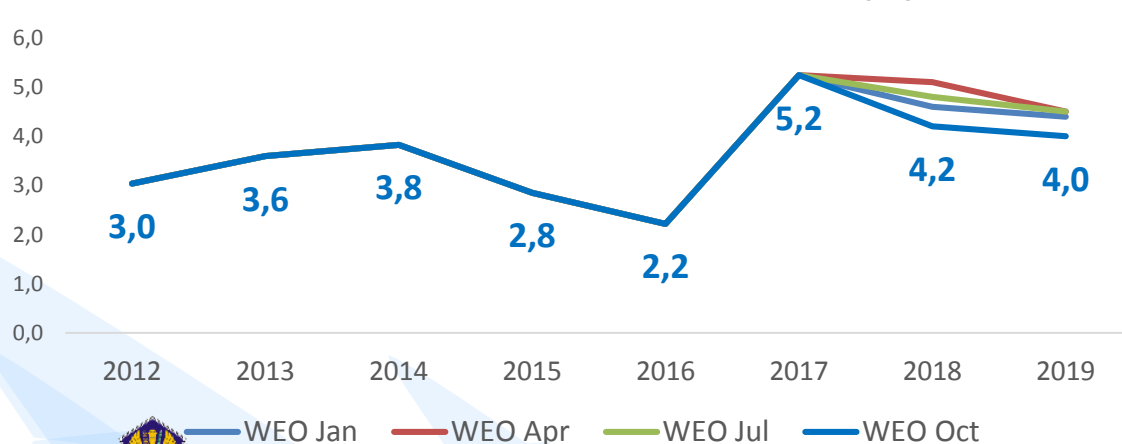
### GLOBAL GDP GROWTH (%)



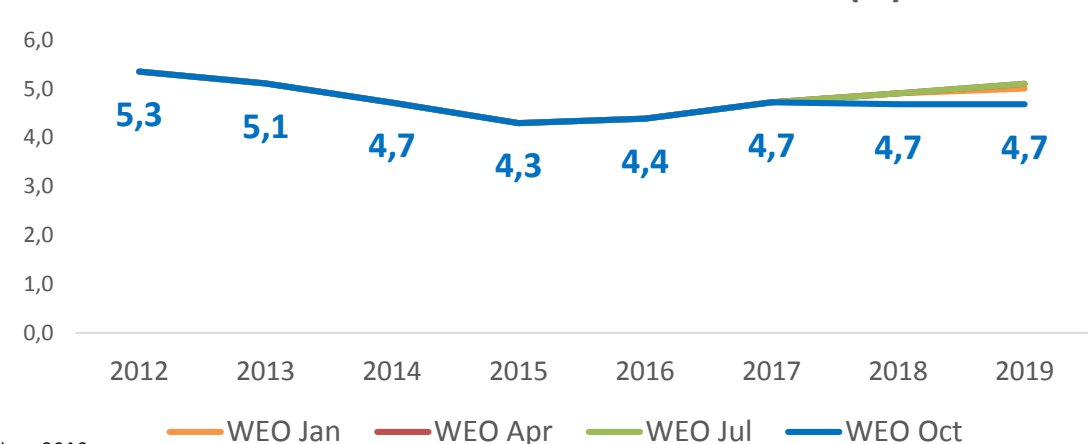
### ADVANCED ECONOMIES GDP GROWTH (%)



### GLOBAL TRADE VOLUME GROWTH (%)



### DEVELOPING COUNTRIES GROWTH (%)



# Penanganan Urbanisasi

- **Urbanisasi bukan hanya persoalan yang dihadapi sebuah negara berkembang** namun menjadi isu global yang perlu menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh bangsa agar penanganan urbanisasi dapat berjalan efektif.
- **Dalam konteks Indonesia tantangan terkait urbanisasi** antara lain:
  - ✓ Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi yang cukup tinggi, hal ini tercermin dari jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat berkisar 34,4% selama kurun waktu dari tahun 1975 sampai dengan 2015.
  - ✓ Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami urbanisasi tertinggi di Kawasan Asia.
  - ✓ Tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia adalah di Jawa.
  - ✓ Masyarakat perkotaan mengalami hambatan akses terhadap air bersih, sanitasi, perumahan yang layak huni, serta menimbulkan kemacetan dan polusi.
- **Upaya mengelola urbanisasi difokuskan pada tiga tujuan utama, yaitu:**
  - ✓ Mempertemukan dan memperluas layanan dasar untuk memastikan bahwa penduduk Indonesia bisa menikmati pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi yang bermutu untuk mengurangi ketimpangan.
  - ✓ Menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan transportasi baik dalam kota maupun dari daerah sekitarnya untuk menghindari konsentrasi penduduk di perkotaan.
  - ✓ Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- **Sejalan dengan hal tersebut kebijakan yang telah ditempuh pemerintah** antara lain:
  - ✓ Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bidikmisi.
  - ✓ Mengurangi kesenjangan antar pusat dan daerah serta antar daerah, melalui peningkatan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan kualitas layanan publik (DID).
  - ✓ Mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di beberapa daerah, antara lain melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  - ✓ Mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas antara lain jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan transportasi massal.
  - ✓ Meningkatkan akses layanan dasar untuk air bersih dan sanitasi.
  - ✓ Meningkatkan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pembiayaan bagi ultra mikro (UMI).



# Investasi pada Human Capital

- *Human Capital Index* (HCI) adalah indeks untuk mengukur keterkaitan beberapa *outcome* hasil pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan dan dikaitkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja generasi mendatang.
- Komponen yang digunakan dalam perhitungan HCI:
  - ✓ **survival**, indikator yang digunakan adalah peluang hidup bayi baru lahir mencapai umur lima tahun (*probability of survival to age 5*).
  - ✓ **pendidikan**, indikator yang digunakan adalah *expected years of schooling* (untuk mengukur kuantitas pendidikan) dan *harmonized test scores* (untuk mengukur kualitas pendidikan).
  - ✓ **kesehatan**, indikator yang digunakan adalah *survival rate* (age 15-60) dan *fraction of children under 5 not stunted*.
- **HCI Indonesia adalah 0.53** atau berada di **peringkat ke 87** dari 157 negara, **lebih tinggi dibandingkan rerata negara *lower middle income***, namun **sedikit lebih rendah dibandingkan rerata negara *upper middle income***. Jika dibandingkan dengan kawasan, posisi HCI Indonesia lebih baik dari rata-rata negara kawasan Subsahara Afrika dan Asia Selatan tetapi sedikit lebih rendah dibanding rata-rata negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
- HCI berpotensi untuk dapat dijadikan **platform dalam penyusunan arah dan strategi percepatan peningkatan kualitas *human capital* di Indonesia ke depan**. Pemerintah Indonesia merespon positif *launching* HCI yang akan datang sebagai bagian upaya pembangunan sumber daya manusia di dunia yang selaras dengan prioritas utama pembangunan nasional dan SDGs.
- Tindak lanjut dari *Human Capital Project* dan *launching* HCI → *Beyond Bali Initiatives*
  - ✓ **Community of Practice**, convenes Early Adopters, virtually and physically
  - ✓ **Twinning**, pairs Early Adopters with countries that are similar but more mature on Human Capital Outcomes
  - ✓ **Human Capital TechEmerge**, supports Early Adopters connect with technological solutions that can enhance service delivery
  - ✓ **Staff Exchange**, shares expertise between Early Adopters to build capacity, exchange knowledge, and develop a culture of dialogue and cooperation
  - ✓ **Human Capital Fellows**, identifies and helps develop young local professionals in Early Adopters who can support governments and World Bank teams in scaling up cross-sectoral human capital initiatives
  - ✓ **Social Accountability for Human Capital**, offers material for countries to customize as part of a broad public campaign in support of human capital development

# Prakarsa Bali Fintech Agenda

- Kemajuan teknologi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi → produktivitas
  - ✓ tidak terdistribusi secara merata di berbagai negara
  - ✓ teknologi merupakan alternatif menuju pembangunan inklusif
- Produktivitas di era digital dihitung dari inspirasi dan inovasi → perlu lingkungan yang kondusif untuk inovasi produk yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- Optimalisasi peluang dari teknologi → diperlukan kebijakan yang melibatkan peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat → peningkatan akses dan kualitas layanan publik
- Inisiasi 12 prinsip FinTech oleh IMF, WB, BI, dan Kementerian Keuangan → mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan
- Setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam pemanfaatan Fintech → pemerintah harus objektif dalam perumusan aspek perpajakan → tidak hanya mengatur pergerakannya namun juga bagaimana mendorong peran institusi keuangan terhadap perekonomian
- Untuk aspek keadilan, pemain lama dan baru dalam teknologi perlu dijaga dalam *level of playing field* yang sama
- Pemerintah sebagai otoritas perlu memberikan ruang cukup bagi inovasi untuk tumbuh dan berkembang dengan pendekatan *lite touch and safe harbour*



# Strategi Penanganan Bencana (DRFI)

- Indonesia meluncurkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (*Disaster Risk Financing and Insurance – DRFI*) untuk **mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dan terjaminnya keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.**
- **Prioritas DRFI Indonesia:**
  - ✓ Perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), rumah tangga dan masyarakat khususnya MBR
  - ✓ Pemulihan kehidupan sosial dan usaha masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah
  - ✓ Kolaborasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta
  - ✓ Pemberdayaan industri asuransi dalam negeri
- **Lima strategi utama DRFI Indonesia:**
  - ✓ Kombinasi instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif.
  - ✓ APBN untuk menanggung atau menyerap (*retain*) risiko bencana dengan frekuensi kejadian tinggi namun dengan dampak kerugian rendah sampai dengan sedang.
  - ✓ Pembiayaan kontijensi sebagai komplementer APBN untuk menanggung atau menyerap (*retain*) risiko bencana dengan tingkat kerugian sedang sampai dengan tinggi.
  - ✓ Skema *pooling fund*.
  - ✓ Asuransi untuk mengalihkan (transfer) risiko bencana dengan frekuensi yang rendah namun dengan tingkat kerugian sedang-tinggi.
- **Beberapa kebijakan dan program yang akan dilakukan periode jangka pendek 2018-2019:**
  - ✓ Implementasi *pilot project* asuransi BMN
  - ✓ pelaksanaan studi kelayakan skema *pooling fund*
  - ✓ penguatan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian dan perikanan
  - ✓ eksplorasi potensi skema pembiayaan alternatif
  - ✓ edukasi dan penguatan kapasitas DRFI.





# Penanganan Perubahan Iklim

- Penciptaan peluang bisnis dan pertumbuhan yang memprioritaskan pendanaan program *climate-smart development*
- Instrumen fiskal untuk penanganan perubahan iklim
  - ✓ *Budget tagging* untuk kegiatan hijau
  - ✓ Insentif fiskal untuk mendorong sektor swasta dalam upaya mencapai ketahanan energi dan pangan
  - ✓ Desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan penanganan perubahan iklim



# Prakarsa Pembiayaan Infrastruktur

- Kebutuhan biaya untuk pembangunan infrastruktur sangat besar sementara kemampuan pembiayaan dari sektor publik sangat terbatas → *financing gap*.
- Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas → inovasi dalam menutup *financing gap* dilakukan dengan penerbitan *sovereign bond*, pembiayaan syariah (sukuk) dan skema PPP.
- Pada Februari 2018, Indonesia menerbitkan *green sukuk* pertama di dunia untuk memitigasi *climate change*.
- Indonesia juga meluncurkan prakarsa *SDG One* yang **telah menghasilkan komitmen sebesar USD 2,34 miliar** untuk penyiapan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan dan investasi. *SDG One* melibatkan lembaga keuangan internasional, lembaga donor multilateral dan bilateral, kalangan perbankan, asuransi, filantropis lokal dan internasional, dan lembaga terkait perubahan iklim.



# Kesepakatan Capital Package

- Kelompok Bank Dunia terus berusaha untuk meningkatkan layanan terbaik bagi anggotanya dalam memberantas kemiskinan dan kesenjangan.
- Untuk meningkatkan layanan dimaksud, negara anggota menyepakati kenaikan modal IBRD dan IFC yang dikemas dalam *capital package*.
- Negara-negara anggota telah menyepakati resolusi *capital package* untuk IBRD dan mendorong segera tercapainya resolusi *capital package* untuk IFC.



# TERIMA KASIH

